PROSEDUR PERMOHONAN SHAR-E CARD PADA BANK MUAMALAT

Aprilianti

ABSTRAK

Pasca krisis ekonomi yang diikuti dilikuidasinya beberapa bank swasta nasional pada tahun 1997 memunculkan pemikiran alternatif dan langkah-langkah untuk mengembangkan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah tercermin dari pola operasi bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Shar-E Card adalah salah satu jenis layanan kartu kredit oleh bank Muamalat di mana saldonya merupakan saldo piutang dengan prinsip mudharabah yaitu tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana.

Kata Kunci: *Shar-E Card, Bank Muamalat*

A. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan *financial intermediary* yang mempunyai peranan sangat vital dalam struktur perekonomian di setiap negara. Bank berperan menghimpun dana dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Sedemikian strategisnya peranan bank dalam pembangunan perekonomian negara, sehingga setiap negara berusaha menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, tangguh, dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat.

Seiring dengan krisis ekonomi yang diawali dengan dilikuidasinya beberapa bank swasta nasional pada tahun 1997 dan kurang mantapnya kinerja bank-bank milik pemerintah, telah memunculkan pemikiran alternatif dan langkah-langkah untuk mengembangkan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 menyatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Seirama dengan ketatnya persaingan pada sektor perbankan, lembaga-lembaga keuangan (bank) mengeluarkan trend-trend produk yang sangat kompetitif antara bank konvensional dan

bank syariah. Di dalam perbankan syariah pengembangan produk-produk bank tidak dapat dilepaskan dari metode operasi bank yang pendekatannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mempelajari ketentuan syariah tentang metode ekonomi Islam atau melihat ekonomi yang lazim berkembang dalam operasional perbankan konvensional dan menempatkan ketentuan hukum Islam yang dapat diimplementasikan ke dalam mekanisme tersebut. Dilihat dari beragamnya produk bank syariah, salah satu trend produk yang dikeluarkan oleh bank syariah yaitu Bank muamalat adalah *Shar-E Card*.

Shar-E Card dikenal masyarakat awal tahun 2004. Pada prinsipnya ia merupakan kartu debit di mana saldonya merupakan saldo piutang. Berbeda halnya dengan kartu kredit di mana saldonya merupakan saldo terutang.

Kartu tersebut menganut prinsip *mudharabah* yaitu tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

Pokok masalah penelitian ini berkaitan dengan syarat-syarat dan prosedur penerbitan *shar-E card* dan perjanjian penggunaan *shar-E card*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum

normatif terapan (*applied law research*), dengan tipe penelitian diskriptif. Pendekatan masalah secara yuridis teoritis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data melalui studi pustaka, studi dokumen. Analisis dilakukan secara kualitatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadist.

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun hubungan antara perorangan dengan masyarakat¹. Muamalat ini meliputi bidang kegiatan jual beli (*ba'e*), bunga (*riba*), piutang (*qoroah*), gadai (*rohan*), memindahkan utang (*hawalah*), bagi untung dalam perdagangan (*qiro'ah*), jaminan (*domah*), persekutuan (*syirkoh*), persewaan dan perburuhan (*ijaroh*)².

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurigai, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas³.

Perbedaan pokok antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi Bank Syariah. Secara teori Islam, karakteristik Bank Syariah terletak

pada sistem yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*).

Keberadaan bank syariah lebih dikembangkan lagi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun Undang-Undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat karena belum secara tegas mencantumkan kata prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Selain itu, pengertian bagi hasil yang dipakai dalam undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah maupun *Islamic bank* yang memiliki cakupan lebih luas dari pada pengertian bagi hasil.

Landasan yuridis yang lebih mantap bagi bank syariah diperoleh setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bank syariah secara jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya.

Selanjutnya, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah agar dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank syariah.

Dasar Hukum Bank Syariah

Akomodasi peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap ruang gerak perbankan syariah terdapat pada peraturan perundang-undangan berikut ini.

- a. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- b. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral. Undang-undang ini memberi peluang bagi BI untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Bank Syariah. Kedua peraturan Perundang-undangan ini mengatur kelembagaan bank syariah yang meliputi tata cara pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank;

¹ Abdul Wahaf Khallaf. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Risalah. Bandung. 1980. hlm. 46.

² Moh. Anwar. *Fiqh Islam*, al-Ma'rif. Bandung. 1979. hlm. 23

³ Edy Wibowo dan Untung Hendi W. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2005, hlm 33.

- d. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar bank atas Akhir Kliring Lokal, Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antar bank Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia. Peraturan Perundang-undangan tersebut mengatur tentang likuiditas dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah;
- e. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS) yang berkedudukan di Basel, Swiss yang diajukan acuan oleh Perbankan Indonesia untuk mengatur pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*Prudential Bankin Regulation*);
- f. Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan lembaga lain sebagai pendukung operasi Bank Syariah yang meliputi ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas bank sentral, ketentuan standar akuntansi dan audit, ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara bank dengan nasabah (arbitrase muamalah), standarisasi fatwa produk bank syariah, dan peraturan pendukung lainnya.

Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut.

- a. menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangun-

an nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran; meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan;

- b. membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya;
- d. berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan metode lain.

Produk-produk Bank Syariah

Menurut Pasal 36 Peraturan BI Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Syariah memiliki beberapa produk pembiayaan seperti:

- a. melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain:
 - 1) giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*;
 - 2) tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan/atau *mudharabah*; atau
 - 3) deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.
- b. melakukan penyaluran dana melalui:
 - 1) Prinsip jual beli antara lain: *murabahah*, *istishna*, *salam*.
 - 2) Prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain: *mudharabah*, *musyarakah*.
 - 3) Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain: *ijarah*, *ijarah munthiya bittamlik*.
- c. prinsip pinjam meminjam berdasarkan *akad qaradh*.

- d. melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: wakalah, wahalah, kafalah, rahn.
- e. membeli, menjual dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- f. membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- g. menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- h. memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- i. menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- j. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan atau surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah;
- k. melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah;
- l. memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
- m. memberikan fasilitas garansi berdasarkan prinsip syariah;
- n. melakukan usaha kartu debit, *charge card* berdasarkan prinsip syariah;
- o. melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah;
- p. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapat Fatwa Dewan Syariah Nasional berdasarkan penjelasan di atas *Shar-E Card* ini merupakan produk bank syariah yaitu berbentuk usaha kartu debit yang berdasarkan prinsip syariah.

Keunggulan Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil memiliki keunggulan atau kelebihan tersendiri bila dibandingkan dengan sistem bunga bank, yaitu:

- a. tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan pada kemampuan ekonominya

sehingga aksesibilitas dari bank syariah menjadi lebih luas;

- b. penyimpanan dana telah terjadi peringatan dini tentang keadaan Banknya yang diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima;
- c. menghilangkan *cash push inflation* yang ditimbulkan perbankan. Sistem bunga dihapuskan sama sekali, dengan demikian Bank Syariah dapat menjadi pendukung kebijakan moneter yang handal;
- d. prinsip bagi hasil tergabung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh Bank sebagai penyedia dana (*shaibul mal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*), jadi tidak terlalu memberatkan nasabah.

Syarat dan Prosedur Permohonan Shar-E Card

Shar-E Card merupakan bentuk inovasi baru cara berbagi hasil dan dijadikan salah satu trend produk Bank Muamalat di dalam penghimpunan dana dari masyarakat. Kartu ini berbentuk kartu debit yang mana saldonya merupakan saldo piutang beda halnya dengan kartu kredit yang saldonya adalah saldo terutang.

Bank Muamalat mengeluarkan produk *Shar-E Card* ini bertujuan untuk menjangkau semua kalangan khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah serta untuk masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan, terutama bila ingin memiliki produk ini tidak harus mendatangi kantor-kantor Bank seperti yang dilakukan oleh para nasabah pada bank-bank konvensional. Mereka cukup mendatangi kantor-kantor pos yang ada diseluruh Indonesia yang telah memiliki sistem pembayaran online yang disebut dengan SOPP (*Sistem Online Payment Point*).

Shar-E Card juga khusus dihadirkan bagi nasabah yang membutuhkan pengelolaan dana secara Islami sehingga begitu mudah untuk diperoleh, mudah dalam hal penyetorannya, mudah dalam penggunaan dananya, dan dijamin halal dalam pengelolaannya.

Unsur kemudahan dalam memperoleh layanan karena syarat-syarat sebagai pemegang *Shar-E Card* sangat mudah dan dalam penyetorannya dapat dilakukan pada setiap

counter-counter Bank Muamalat serta di semua Kantor Pos yang telah memiliki SOPP, selain dalam hal penggunaan serta pengelolaan dananya Bank Muamalat melakukannya secara halal.

Fungsi *Shar-E Card* adalah sebagai pengganti dari buku tabungan, karena pada produk tabungan *Shar-E* yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat ini tidak diberikan buku tabungan. *Shar-E Card* juga berfungsi sebagai kartu debit (*Charge Card*) yang dapat digunakan dalam transaksi pembayaran sebagai pengganti uang tunai pada toko-toko (*merchant*) yang telah melakukan kerjasama dengan pihak Bank Muamalat.

Syarat-syarat permohonan *Shar-E Card* adalah:

- a. menyerahkan foto copy identitas yang masih berlaku, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. mengisi aplikasi yang diberikan oleh Bank Muamalat. Di dalam aplikasi tersebut pemohon wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Hal ini berkaitan dengan salah satu pasal pada pengisian aplikasi ini yaitu segala data yang diberikan nasabah kepada Bank akan dianggap benar dan atau sah, karenanya Bank tidak bertanggung jawab atas segala sangketa yang timbul di kemudian hari karena ketidakbenaran data yang diberikan. Selain data diri dari pemohon, di dalam aplikasi juga termuat semua syarat-syarat dan ketentuan umum pemegang *Shar-E Card*. Terdapat juga suatu akad dan pernyataan, yaitu dengan ditandatangani aplikasi, maka pemohon telah menyetujui dan mengikatkan diri pada semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Akad dan pernyataan yang dimaksud dalam keterangan di atas adalah akad Mudharabah dengan nisbah bagi hasil sebesar 51:49 (nasabah : Bank);
- c. melakukan penyetoran. Penyetoran tidak harus dilakukan pada *counter-counter* Bank Muamalat melainkan dapat dilakukan pada seluruh Kantor-kantor Pos yang ada di Indonesia yang telah memiliki SOPP (*Sistem Online Payment Point*). Pada penyetoran perdana *Shar-E* ini pemohon tidak harus mengeluarkan dana yang besar seperti halnya pada bank konvensional, karena sesuai tujuan dari produk ini adalah untuk menjangkau kalangan ekonomi kelas bawah.

Dana yang harus dikeluarkan seorang pemohon hanya sebesar Rp. 125.000,- sudah termasuk biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- serta sisanya untuk saldo awal nasabah yaitu sebesar Rp. 100.000,-. Setelah pemohon melakukan penyetoran, maka pemohon dapat secara penuh menguasai kartu tersebut, dan dapat langsung digunakan untuk transaksi-transaksi baik penyetoran, penarikan maupun transaksi-transaksi lainnya yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Prosedur Permohonan *Shar-E Card*

Prosedur permohonan *Shar-E Card* sama halnya seperti prosedur pembukaan rekening pada bank konvensional. Pada bank konvensional bila seorang calon nasabah ingin membuka rekening maka akan mendatangi kantor bank tersebut dan mengikuti semua syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak Bank. Untuk kepemilikan *Shar-E Card* pada Bank Muamalat, calon pemegang *Shar-E Card* diberikan kemudahan yaitu tidak harus mendatangi Bank Muamalat tetapi dapat mendatangi Kantor-kantor Pos yang ada di seluruh Indonesia yang telah memiliki SOPP atau jaringan *online*. Pihak bank akan memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah atau calon pemegang *Shar-E Card*. Setelah memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank maka calon nasabah atau calon pemegang *Shar-E Card* tersebut akan diberikan *Shar-E Card* dan langsung dapat digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.

Perjanjian Penggunaan *Shar-E Card*

Pada penggunaan *Shar-E Card* terdapat 2 perjanjian, yaitu perjanjian penerbitan antara penerbit dengan pemegang *Shar-E Card* dan perjanjian kerjasama penggunaan antara penerbit dengan pengusaha. Dengan adanya perjanjian tersebut maka timbul hubungan hukum antara penerbit, pemegang *Shar-E Card* dan pengusaha. Adanya hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang saling harus dipenuhi di antara mereka.

Perjanjian Penerbitan *Shar-E Card*

Jika seorang calon nasabah atau calon pemegang *Shar-E Card* telah memenuhi semua

syarat-syarat dan prosedur permohonan maka pihak Bank akan menerbitkan *Shar-E Card*. Di dalam penerbitan *Shar-E Card* terdapat suatu perjanjian penerbitan, yang dilakukan antara pemegang kartu dengan pihak bank. Perjanjian penerbitan ini bukan berarti penyaluran dana dari bank sebagai penerbit dalam rangka perjanjian pinjam-meminjam uang seperti halnya perjanjian kredit, akan tetapi ini merupakan fasilitas yang diberikan bank kepada pemegang kartu untuk dapat melakukan transaksi-transaksi. Perjanjian penerbitan ini terdapat pada saat pengisian aplikasi yang diberikan oleh pihak bank dalam bentuk akad mudharabah.

Dengan demikian akad Mudharabah merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara bank (Bank Muamalat) dengan nasabahnya (Pemegang *Shar-E Card*) dengan didasarkan pada prinsip bagi hasil. Besarnya bagi hasil antara nasabah dan bank telah ditentukan nisbah bagi hasil 51: 49 (nasabah : bank). Namun demikian, Nisbah yang telah ditentukan ini dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam hal terjadi perubahan nisbah, Bank Muamalat cukup mengumumkannya melalui media cetak Nasional, dan berlaku minimal satu minggu setelah pengumuman tersebut dikeluarkan. Akan tetapi kewajiban untuk mengumumkan perubahan tersebut menjadi tidak berlaku apabila perubahan yang dilakukan adalah untuk menaikkan nisbah bagi hasil porsi nasabah. Dalam hal penetapan nisbah Bank Muamalat menetapkan berdasarkan atas pendapatan Bank Muamalat.

Dalam perjanjian penerbitan *Shar-E Card* telah tercantum hak dan kewajiban antara penerbit dan pemegang *Shar-E Card* yang klausulanya telah ditetapkan oleh penerbit. Adapun kewajiban Bank Muamalat sebagai pihak yang menerbitkan *Shar-E Card* adalah:

- a. mengeluarkan *Shar-E Card*;
- b. memberikan nomor rekening;
- c. memberikan PIN dan TIN;
- d. memberikan pelayanan informasi kepada pemegang *Shar-E Card*;
- e. memberikan kartu baru atas penggantian kartu yang hilang atau dicuri.

Selain mempunyai, kewajiban Bank Muamalat juga mempunyai hak, yaitu:

- a. memeriksa kebenaran data yang diberikan kepada pihak bank;
- b. menolak menerbitkan *Shar-E Card* apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diminta;

- c. apabila terjadi kehilangan atau pencurian kartu maka pihak bank berhak menerima laporan tersebut;
- d. apabila terjadi pemindahtanganan *Shar-E Card* kepada pihak lain maka pihak Bank berhak menerima pemberitahuan secara tertulis;
- e. apabila terjadi perubahan nama, kedudukan, alamat dan perubahan-perubahan lain maka pihak Bank berhak menerima pemberitahuan secara tertulis;
- f. jika dirasakan perlu oleh pihak bank, maka bank berhak menahan dana untuk sementara waktu atas rekening nasabah;
- g. Bank berhak menghentikan, menambah, mengurangi mengadakan perubahan terhadap tingkat pemakaian, cara-cara pemakaian, batas-batas maksimum penarikan dan transaksi, jam operasi, jasa-jasa dan penggunaan lainnya atas *Shar-E Card* atau mengadakan perubahan-perubahan, amandemen atau mengadakan suplemen-suplemen atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pemegang *Shar-E Card*;
- h. Bank berhak setiap saat memblokir, membatalkan dan/atau mengakhiri penggunaan kartu secara sepihak, bila pemegang *Shar-E Card* lalai/tidak mentaati syarat-syarat dan ketentuan umum pemegang *Shar-E Card*;
- i. Bank melakukan pemotongan saldo atas transaksi yang telah dilakukan.

Adapun yang menjadi kewajiban pemegang *Shar-E Card* adalah:

- a. memberikan data yang benar kepada pihak Bank;
- b. menjaga kerahasiaan PIN dan TIN yang diberikan oleh pihak Bank;
- c. memberikan pemberitahuan kepada pihak Bank apabila terjadi kehilangan atau pencurian kartu;
- d. memberikan pemberitahuan secara tertulis apabila terjadi pemindahtanganan *Shar-E Card* kepada pihak lain;
- e. memberikan pemberitahuan secara tertulis apabila terjadi perubahan nama, kedudukan, alamat, dan perubahan-perubahan lain yang terjadi pada pemegang rekening atau pemegang *Shar-E Card*;

- f. pemegang *Shar-E Card* harus mengembalikan dana yang ditarik melalui penggunaan *Shar-E Card* apabila karena sebab apapun dana tersebut bukan milik pemegang *Shar-E Card*;
- g. pemegang *Shar-E Card* harus tunduk pada syarat dan ketentuan umum pemegang *Shar-E Card*.

Pemegang *Shar-E Card* mempunyai hak sebagai berikut:

- a. melakukan penarikan pada *counter-counter* Bank Muamalat dan Kantor-kantor Pos yang telah memiliki SOPP dan pada semua ATM yang telah ditentukan oleh pihak Bank;
- b. melakukan penyetoran pada *counter-counter* Bank Muamalat dan semua Kantor-kantor Pos yang telah memiliki SOPP;
- c. menggunakan *Shar-E Card* untuk melakukan transaksi dengan pedagang yang telah ditunjuk oleh pihak Bank;
- d. memperoleh kartu baru sebagai pengganti kartu yang telah hilang atau dicuri.

Dengan demikian baik pihak penerbit maupun pemegang *Shar-E Card* harus memenuhi semua hak dan kewajibannya masing-masing karena di antara kedua pihak telah menyetujui semua isi perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian Kerjasama Penggunaan *Shar-E Card*

Dalam hal penggunaan *Shar-E Card*, terdapat suatu perjanjian kerjasama antara penerbit *Shar-E Card* (Bank) dengan pengusaha (*merchant*). Perjanjian kerjasama penggunaan *Shar-E Card* berdiri sendiri terlepas dari perjanjian antara penerbit dengan pemegang *Shar-E card*.

Hubungan hukum antara penerbit dengan pengusaha timbul dengan adanya perjanjian yang diadakan di antara mereka, memuat sejumlah hak dan kewajiban yang dibebankan kepada penerbit dan pengusaha.

Adapun yang menjadi kewajiban Bank Muamalat terhadap pengusaha adalah:

- a. melakukan pembayaran atas transaksi yang telah dilakukan oleh pemegang;
- b. meminjamkan alat-alat promosi secara cuma-cuma kepada pengusaha;
- c. memberikan daftar hitam yang berisi nomor-nomor kartu debit yang telah dibatalkan atau yang telah diblokir.

Bank Muamalat mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menunda atau menolak pembayaran tagihan pengusaha maupun memotong/menagih kembali tagihan yang telah dilunasi berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat pemotongan tagihan, apabila terjadi suatu pelanggaran yang diakibatkan dalam kaitannya dengan penyerahan faktur pembelian yang tidak sah atau pelanggaran dalam menjalankan hal-hal yang telah disetujui atas transaksi kartu debit yang mengakibatkan putusnya perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak baik sementara atau seterusnya;
- b. menggunakan nama pengusaha dalam media promosi tanpa adanya kewajiban bagi Bank Muamalat untuk membayar uang jasa apapun kepadanya;
- c. memutuskan perjanjian kerjasama secara sepihak dengan melalui surat pemberitahuan;
- d. mengambil barang-barang yang dipinjamkan pada pengusaha apabila terjadi pemutusan perjanjian kerjasama.

Adapun kewajiban pengusaha terhadap Bank Muamalat adalah:

- a. meneliti keabsahan kartu, yaitu : keaslian dan keutuhan fisik kartu, meneliti tanda tangan pemegang kartu di atas faktur pembelian dibandingkan dengan tanda tangan yang tertera pada kartu debit;
- b. mencetak data yang tertera pada kartu debit dan *merchant plate*;
- c. menyampaikan tagihan kepada Bank Muamalat;
- d. memberikan copy faktur pada pemegang *Shar-E Card* pada saat terjadi transaksi;
- e. tidak melakukan penagihan kembali secara tunai kepada pemegang kartu atas transaksi yang telah terjadi;
- f. menjaga alat-alat promosi yang dipinjamkan Bank Muamalat agar tetap terpelihara dengan baik dan memasang secara tetap alat-alat promosi tersebut sebagai tanda bahwa pengusaha menerima dengan pembayaran dengan menggunakan *Shar-E Card*. Pemasang iklan atau alat-alat promosi tersebut harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Muamalat;

- g. mengembalikan semua alat-alat promosi kepada Bank Muamalat bila perjanjian kerjasama ini berakhir.

Hak pengusaha adalah:

- a. menerima pembayaran atas transaksi yang telah dilakukan oleh pemegang *Shar-E Card* yang telah disetujui oleh Bank Muamalat;
- b. menerima daftar hitam atas kartu yang telah dibatalkan atau diblokir;
- c. memutuskan perjanjian kerjasama secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani setelah pengusaha mengerti dan menyetujui semua syarat-syarat, ketentuan-ketentuan serta tata cara penerimaan kartu debit yang baik dan benar. Perjanjian ini mulai berlaku sah sejak ditandatangani oleh para pihak.

Hak dan kewajiban antara pemegang *Shar-E Card* dengan pengusaha tidak dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, karena hal tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam perjanjian antara pemegang dengan penerbit dan antara pengusaha dengan penerbit.

Hubungan hukum antara pengusaha dan pemegang *Shar-E Card* baru terjalin apabila terjadi transaksi antara keduanya melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pemegang memilih barang yang diinginkan;
- b. pemegang menyerahkan kartu debit *Shar-E*;
- c. pengusaha meneliti keabsahan *Shar-E Card*;
- d. pemegang menandatangani faktur pembelian.
- e. pemegang membawa barang yang dipilih.

Hubungan antara pemegang *Shar-E Card* dengan pengusaha terletak suatu perikatan dasar. Berdasarkan perikatan itu pengusaha berkewajiban menyerahkan barang atau jasa yang diperjanjikan dan pemegang *Shar-E Card* berkewajiban membayar sejumlah yang disepakati. Jadi hubungan hukum antara pemegang *Shar-E card* dengan pengusaha baru timbul apabila terjadi transaksi antara keduanya yang berupa jual beli barang atau jasa. Proses transaksi tersebut berakhir atau dianggap selesai setelah pemegang *Shar-E Card* menandatangani *sales draft* dari pengusaha. Sejak ditandatanganinya *sales draft*, timbul kewajiban penerbit untuk membayar kepada pengusaha dan hak penerbit

untuk menagih/melakukan pemotongan saldo pemegang *Shar-E Card*. Dengan demikian penandatanganan *sales draft* merupakan momentum penting yang membuat ketiga pihak menjadi terkait dan menimbulkan hubungan timbal balik yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akan tetapi sesungguhnya dari hubungan ini pula tercermin adanya kecenderungan bahwa perjanjian yang disepakati antara penerbit yaitu pihak Bank dengan pemegang *Shar-E Card* adalah perjanjian baku. Hal ini dapat dilihat dari perjanjian di mana seorang calon nasabah hanya tinggal menyetujui dan menandatangani formulir aplikasi yang di dalamnya berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan bagi pemegang *Shar-E Card*, begitu pula pada perjanjian kerjasama penggunaan *Shar-E Card* antara penerbit dengan para pengusaha.

C. PENUTUP

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bank Muamalat dapat menerbitkan *Shar-E Card* apabila pemohon telah memenuhi semua syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Bank Muamalat;
- b. perjanjian penggunaan *Shar-E Card* ada dua, yaitu perjanjian penerbitan *Shar-E Card* dan perjanjian kerjasama penggunaan *Shar-E Card*. Perjanjian tersebut bersifat balik karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dengan demikian timbulnya hubungan hukum antara pemegang *Shar-E Card* dengan pihak Bank Muamalat adalah karena adanya penerbitan *Shar-E Card* dan hubungan hukum antara Bank Muamalat dengan pengusaha adalah hubungan hukum yang timbul karena adanya perjanjian kerjasama penggunaan *Shar-E Card*. Sedangkan hubungan hukum antara pemegang *Shar-E Card* dengan pengusaha adalah hubungan hukum yang baru terjalin apabila terjadi transaksi di antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. Syafi'i. 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. PT. Amanah Bunda Sejahtera. Solo.

- . 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani. Jakarta.
- Anwar, Muhammad. 1983. *Fiqih Islam*, al-Ma'rif. Bandung.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1983. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Risalah. Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Noor, Zainul Bahar. 2006. *Bank Muamalat Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan*. Bening Publishing. Jakarta.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibyo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 27. edisi Revisi. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Wibowo, Edi dan Untung Hendi W. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Zuhri, Muhammad. 1996. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.